

# PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS SEBAGAI TOLAK UKUR KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA BANDUNG

Silvia Cesilia Paliama<sup>1</sup>

Assoc. Prof. Dr. Nia Karniawati, S.IP, M.Si<sup>2</sup>

E-Mail : [silviapaliama12@gmail.com](mailto:silviapaliama12@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Gelandangan dan pengemis adalah masalah yang persisten di setiap kota besar, termasuk Kota Bandung. Meskipun pemerintah telah berusaha menangani masalah ini, upaya tersebut belum mencapai hasil yang diinginkan. Gelandangan dan pengemis masih terlihat di pusat kota secara rutin. Kebijakan yang diterapkan pemerintah tampaknya tidak efektif karena gelandangan terus bertambah. Ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan tidak tepat dan tidak memberikan manfaat yang signifikan. Meskipun telah dilakukan pendekatan represif dan pemberian pelatihan keterampilan, efeknya hanya bersifat sementara. Pemerintah Kota Bandung belum melakukan strategi yang berfokus pada akar permasalahan, yaitu keluarga. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah penanganan dengan pendekatan intervensi berbasis keluarga.

**KATA KUNCI:** *Gelandangan, Pengemis, Kesejahteraan, Sosial.*

## **ABSTRACT**

*Strangers and beggars are a persistent problem in every big city, including Bandung. Although the government has tried to deal with the problem, the effort has not achieved the desired results. Trappers and beggars are still seen in the city center routinely. The government's policies seem to be ineffective as the runaways continue to rise. This suggests that the strategy used is inappropriate and does not provide significant benefits. Despite repressive approaches and skill training, the effects are only temporary. The Government of Bandung has not implemented a strategy that focuses on the root of the problem, namely the family. Therefore, the solution offered is treatment with a family-based intervention approach.*

**KEY WORDS:** *Wanderers, Beggars, Welfare, Social.*

<sup>1</sup> Mahasiswa Sarjana Ilmu Pemerintahan FISIP UNIKOM

<sup>2</sup>Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UNIKOM

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu wujud dari upaya mencapai tujuan suatu wilayah, dan salah satunya melindungi masyarakat dan memajukan kesejahteraan umum. Terkait dengan masalah kesejahteraan sosial yang berkembang saat ini, terdapat peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis yang semakin meluas.

Penanggulangan geledang dan pengemis menjadi isu yang serius dan menjadi tolak ukur kesejahteraan sosial di Kota Bandung. Kondisi ini tidak hanya merupakan indikator kemiskinan dan ketidakstabilan sosial, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem sosial dalam mengatasi masalah ekonomi dan sosial yang kompleks. Kota Bandung, sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, memiliki tantangan unik dalam mengatasi masalah ini, termasuk perbedaan yang besar antara kemampuan ekonomi dan akses terhadap layanan sosial.

Geledang dan pengemis di Kota Bandung seringkali menjadi korban dari ketidakstabilan ekonomi, kekurangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja yang layak. Mereka sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit untuk dipecahkan, yang menunjukkan adanya kesenjangan yang besar antara kemampuan ekonomi dan kebutuhan dasar. Penanggulangan geledang dan pengemis menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Bandung, dengan fokus pada pengembangan program

sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Program-program yang dirancang untuk mendukung geledang dan pengemis harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pengurangan ketidakstabilan ekonomi, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta pembentukan komunitas yang kuat dan mendukung. Dengan demikian, penanggulangan geledang

dan pengemis tidak hanya menjadi tanggung jawab individu atau organisasi, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh masyarakat, termasuk pemerintah kota, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Dalam konteks ini, pengembangan strategi dan program yang efektif menjadi sangat penting. Strategi harus berfokus pada pengurangan ketidakstabilan ekonomi, peningkatan akses terhadap layanan dasar, dan pembentukan komunitas yang mendukung. Program-program harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari geledang dan pengemis, serta memastikan bahwa mereka memiliki akses yang sama terhadap layanan dan peluang.

Secara keseluruhan, penanggulangan geledang dan pengemis di Kota Bandung menjadi tantangan yang kompleks yang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inklusif. Melalui kerjasama antara berbagai pihak, diharapkan dapat dicapai peningkatan kesejahteraan sosial di Kota Bandung, dengan geledang dan pengemis sebagai bagian integral dari masyarakat yang lebih inklusif dan berkesinambungan.

Berdasarkan fenomena diatas, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai

“Penanggulangan Gelandang dan Pengemis Sebagai Tolak Ukur Kesejahteraan di Kota Bandung?”. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai peran pemerintah dalam menanggulangi gelandang dan pengemis di Kota Bandung.

## **METODE**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan menggunakan jenis penelitian Literature Review. Peneliti akan menganalisis beberapa data berupa referensi berdasarkan buku maupun jurnal yang berkaitan kemudian dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran mengenai Penanggulangan Gelandang dan Pengemis Sebagai Tolak Ukur Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung. Hasil tersebut diolah peneliti untuk menjadi informasi penting dan berguna bagi Dinas Sosial di Kota Bandung. Data yang sudah terkumpul akan diolah dengan model analisis interaktif (Miles, 2005). Tahapan model analisis ini antara lain: mengumpulkan data, mengurangi/ mereduksi data, menyajikan data, dan menyusun kesimpulan/verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Gelandangan adalah individu yang hidup di luar norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tanpa tempat tinggal atau pekerjaan yang stabil, dan sering mengembara di tempat umum. Pengemis adalah orang yang mencari penghasilan dengan meminta-minta di depan umum dengan berbagai cara dan alasan, umumnya untuk mendapat belas kasihan orang lain. Gelandangan pengemis adalah seseorang

yang hidup menggelandang sekaligus mengemis.

Penanganan masalah kesejahteraan sosial gelandangan dan pengemis menjadi dilema ekonomi dalam upaya mengurangi kemiskinan di Kota Bandung. Dinas Sosial Kota Bandung berkolaborasi dengan Satpol PP untuk menangani masalah gelandangan dan pengemis dalam rangka mendukung program pemerintah Kota Bandung dengan menertibkan keberadaan mereka di persimpangan jalan, lampu lalu lintas, jembatan, restoran, tempat ibadah, dan jalan-jalan utama.

Keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Bandung, dengan berbagai cara yang mereka lakukan, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, permasalahan sosial-budaya, masalah keluarga, dan kurangnya motivasi. Meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis mengakibatkan terjadinya tindak kriminal, ketidaknyamanan bagi warga, gangguan pada lalu lintas, serta masalah kebersihan dan keamanan di kota tersebut.

Gelandangan di Kota Bandung memiliki beragam karakteristik, meskipun mereka seringkali dianggap sebagai satu kelompok homogen. beberapa karakteristik umum yang sering terlihat yaitu Kehidupan di Jalanan, Gelandangan di Bandung umumnya tinggal di jalanan, baik itu di bawah jembatan, di taman-taman kota, di pinggir sungai, atau di tempat-tempat terbuka lainnya. Mereka biasanya tidur di tempat-tempat yang tidak aman dan tidak nyaman. Banyak dari mereka memiliki kondisi kesehatan yang buruk karena kekurangan nutrisi, akses terbatas terhadap layanan medis, serta paparan terhadap cuaca dan lingkungan yang keras. Sebagian besar gelandangan hidup dalam kemiskinan yang ekstrem. Mereka sering kali tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang

stabil, sehingga tergantung pada bantuan sosial, sumbangan dari masyarakat, atau penghasilan harian yang diperoleh dari aktivitas seperti mengamen atau menjual barang bekas. adapun gelandangan dengan Masalah Kesejahteraan Mental, Banyak gelandangan menghadapi masalah kesejahteraan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan lainnya. Kondisi ini sering kali tidak terdiagnosis dan tidak diobati, dan Kebanyakan gelandangan tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan. Banyak dari mereka tidak menyelesaikan sekolah dasar dan tidak memiliki keterampilan atau pelatihan yang memadai untuk dapat bersaing di pasar kerja. arena keadaan mereka yang rentan dan seringkali terpinggirkan, gelandangan rentan menjadi korban kejahatan, baik itu kekerasan fisik, pencurian, atau eksploitasi lainnya.

Meskipun banyak yang hidup dalam kondisi sulit, beberapa organisasi non-pemerintah dan sukarelawan berusaha untuk memberdayakan gelandangan dengan menyediakan tempat perlindungan sementara, makanan, layanan kesehatan, serta pelatihan keterampilan untuk membantu mereka keluar dari situasi kemiskinan dan keputusasaan.

Karakteristik gelandangan di Kota Bandung ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh kelompok rentan ini di banyak kota di seluruh dunia.

Instansi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Bandung adalah Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Kedua instansi

ini memainkan peran sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandung, dengan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Sosial.

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Sosial Kota Bandung memiliki beberapa program utama. Pertama, mereka merumuskan dan melaksanakan persiapan bahan dan peralatan kerja dengan mendetailkan jenis dan jumlah peralatan yang diperlukan agar mudah diakses dan digunakan di lapangan. Kedua, mereka merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan menyusun jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas untuk mengetahui pencapaian hasil dari kegiatan tersebut, apakah sesuai dengan rencana kerja dan standar keberhasilan yang telah ditetapkan. Ketiga, mereka melakukan inventarisasi dan identifikasi data mengenai penyandang tuna sosial seperti mantan Warga Terlantar dan Sosial (WTS), gelandangan, pengemis, dan waria. Keempat, mereka melakukan pencegahan dan penertiban bekerja sama dengan pihak terkait, menyediakan bahan pembinaan, memberikan bimbingan, konsultasi teknis, serta memberikan bantuan usaha ekonomi produktif, serta menjalankan program rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial seperti mantan WTS, gelandangan, pengemis, dan waria.

Langkah atau upaya untuk mencegah kemunculan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, masyarakat umum, RT, dan RW. Salah satu bentuk sosialisasi yang telah dilakukan adalah dengan memberikan surat himbauan, menyebarkan informasi melalui media massa dan pamflet, iklan di televisi, papan reklame, dan spanduk.

Dalam program penanggulangan gelandangan dan pengemis, telah dirancang serangkaian kegiatan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Program ini melibatkan pelatihan seperti pembuatan sepatu, menjadi montir, memasak, dan lain sebagainya. Tujuan dari program keterampilan ini adalah agar para gelandangan dan pengemis mampu membangun usaha sendiri. Namun, ada tantangan dalam hal kurangnya penyesuaian dengan bakat yang dimiliki oleh gelandangan dan pengemis, serta kurangnya kemampuan untuk menghasilkan uang, yang menyebabkan sebagian dari mereka kembali ke jalanan setelah menjalani pelatihan.

Meskipun ada beberapa gelandangan yang ingin berhenti menjadi gelandangan, kegiatan ini merupakan satu-satunya cara untuk mencari penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun Dinas Sosial telah memberikan kegiatan untuk mengurangi gelandangan yang berkeliaran di jalanan, namun mentalitas gelandangan masih cenderung untuk kembali ke jalanan. Pada dasarnya, gelandangan dan pengemis memiliki keinginan untuk berhenti, tetapi karena minimnya peluang pekerjaan membuat mereka kembali ke jalanan. Meskipun pelatihan keterampilan yang diberikan oleh Dinas Sosial sudah cukup baik, kurangnya penyesuaian dengan minat dan bakat mereka menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Dinas Sosial Kota Bandung melakukan kegiatan pemantauan yang meliputi razia, penertiban, pendataan, dan arahan, bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Dalam operasi

razia tersebut, gelandangan dan pengemis yang berasal dari luar Kota Bandung akan dipulangkan ke daerah asal mereka. Namun, jumlah gelandangan dan pengemis yang dipulangkan tidak sebanding dengan jumlah yang tertangkap selama razia. Ini karena banyak juga gelandangan dan pengemis yang datang dari luar Kota Bandung.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga merupakan badan pemerintah yang bertanggung jawab dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Tugas dan kewenangannya meliputi pengawasan, penertiban, razia, pengamanan, dan penangkapan terhadap pelanggaran yang diatur dalam peraturan daerah, serta melindungi aset-aset pemerintah seperti kantor walikota, kantor gubernur, rumah dinas, dan lainnya.

Satpol PP Kota Bandung secara rutin melakukan razia terhadap gelandangan dan pengemis di seluruh wilayah Kota Bandung. Razia dan patroli dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan kondisi masyarakat yang menjadi sumber masalah sosial seperti Pedagang Kaki Lima, rumah liar, pekerja seks komersial (PSK), bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB), termasuk juga gelandangan dan pengemis.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satpol PP Kota Bandung terutama fokus pada razia, penertiban, dan pendataan, serta mengarahkan kepada instansi terkait untuk penanganan lebih lanjut. Sedangkan tugas dan fungsi pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kota Bandung. Dalam konteks ini, peran Satpol PP hanya bersifat memberikan bantuan teknis dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kota Bandung.

Ada beberapa kosep secara umum dalam

menangani masalah gelandangan dan pengemis di Kota Bandung, yaitu melakukan tindakan pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. Namun, pemerintah Kota Bandung tidak sepenuhnya menerapkan konsep tersebut secara menyeluruh. Kehadiran gelandangan dan pengemis di Kota Bandung menjadi salah satu tantangan dalam mencapai tujuan pemerintah kota, khususnya dalam menciptakan lingkungan kota yang indah, tertib, dan aman bagi masyarakat. Sebagian urbanisator yang datang dari daerah-daerah atau desa untuk mencari penghidupan dengan keahlian atau keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di kota, mengakibatkan mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. Ada juga sebagian urbanisator atau pendatang yang sengaja datang dari daerah lain untuk mencoba peruntungan sebagai pengemis dan hidup sebagai gelandangan di Kota Bandung.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa model penanganan gelandangan dan pengemis yang dapat diadopsi oleh Pemerintah Kota Bandung, terutama oleh Dinas Sosial. Model-model tersebut (Suharto, 2008) adalah:

**Street-Centered Intervention**, merupakan penanganan yang difokuskan di jalanan tempat gelandangan biasanya beroperasi. Pendekatan ini bersifat sementara dan sulit diukur hasilnya.

**Family-Centered Intervention**, adalah penanganan yang menitikberatkan pada pemberian bantuan sosial atau pemberdayaan keluarga. Keluarga dianggap sebagai pusat masalah dan juga pusat solusi. Jika keluarga stabil, anggotanya kemungkinan besar tidak

akan terjerumus menjadi gelandangan atau pengemis.

**Institutional-Centered Intervention**, merupakan penanganan yang difokuskan pada lembaga seperti Panti, Rumah Singgah, atau Open House. Pendekatan ini dimulai dengan tindakan represif untuk mengumpulkan objeknya secara paksa, lalu mereka ditempatkan di suatu tempat terkumpul untuk menjalani karantina dan pelatihan keterampilan.

**Community-Centered Intervention**, adalah penanganan yang berfokus pada pembentukan komunitas. Pendekatan awalnya adalah membentuk komunitas tanpa mengumpulkan mereka secara paksa, tetapi memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mengatur diri sendiri dengan bimbingan dari pemerintah dan bantuan materiil dari pemerintah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandung, melalui Dinas Sosial Kota Bandung, telah menerapkan dua model penanganan gelandangan dan pengemis, yaitu *street-centered intervention* dan *institutional-centered intervention*.

**Street-Centered Intervention**, yang mencakup kegiatan razia, pembinaan, pemulangan, dan tindakan di jalanan atau tempat di mana gelandangan dan pengemis biasanya berada, merupakan bagian dari pendekatan *institutional-centered intervention* yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Namun, pendekatan ini tidak memberikan hasil yang maksimal karena kurangnya intensitas dalam pelaksanaannya.

**Institutional-Centered Intervention**, yang difokuskan pada lembaga seperti panti, rumah singgah, atau open house, juga telah diterapkan.

Namun, kendala yang dihadapi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Bandung dalam melaksanakan pendekatan ini adalah kurangnya lembaga atau panti sosial khusus untuk gelandangan dan pengemis serta kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, terutama Kepolisian.

Kedua model tersebut, menurut penulis, tidak tepat untuk menangani masalah gelandangan dan pengemis di Kota Bandung. Penyebab utama munculnya gelandangan dan pengemis adalah masalah dalam keluarga, yang meliputi pendidikan, ekonomi, dan keharmonisan. Oleh karena itu, penulis menyarankan pendekatan yang berbasis pada keluarga, yaitu Family-Centered Intervention.

Family-Centered Intervention merupakan pendekatan yang cocok untuk menangani akar masalah keluarga yang menyebabkan munculnya gelandangan dan pengemis di Kota Bandung. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemberian bantuan sosial atau pemberdayaan keluarga. Bagi gelandangan dan pengemis yang berasal dari Kota Bandung atau yang telah menetap, pendekatan ini dapat berupa pemberian bantuan sosial atau pemberdayaan keluarga miskin atau tidak mampu.

Dengan memberikan bantuan atau pemberdayaan kepada keluarga seperti pemberian modal usaha, keterampilan, alat-alat mesin jahit, dan sebagainya, diharapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi dan pendidikan keluarga. Hal ini akan berdampak pada perubahan keadaan hidup keluarga, terutama dalam hal ekonomi. Jika kebutuhan

ekonomi keluarga terpenuhi, maka kebutuhan untuk sandang, pangan, dan papan juga akan terpenuhi. Sehingga diharapkan akan terjadi perubahan dalam masyarakat menuju hidup yang layak sesuai dengan norma dan budaya yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, JE. (1979). *Public Policy Making*. New York: Holt.
- Huraerah, A. (edt) (2003). *Isu Kesejahteraan Sosial di Tengah Ketidakpastian Indonesia*. Bandung: CEPLAS FISIP Universitas Pasundan. 6. Midgley, James. 1995
- Iqbali, Saptono. (2005). *Gelandangan-Pengemis (GEPENG) di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem*. Sosial Ekonomi Pertanian, Jurnal Universitas Udayana: Denpasar.
- Muslim. (2013). *Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan di Kota Pekanbaru*. Jurnal: Pekanbaru.
- Nuryitmawan, Tegar Rismanuar. (2016). *Studi Komparasi Kemiskinan di Indonesia: Multidimensional Poverty dan Monetary Poverty*. Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan, ISSN: 2528-1879.
- Pandu, Baniadi (2018). *Analisis Kemiskinan Multidimensi di Kota Yogyakarta*. Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Suharto, E. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

